**STRATEGI FUNGSI PENGEMBANGAN ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**

**ARTIKEL**

**Oleh**

**AI NUNUNG NPM : 179020029**



**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL BIDANG KAJIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2021**

ABSTRAK

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan Rakyat ,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ( Disperkimtan ) Kabupaten Bandung, belum mampu memberikan hasil kerja yang efektif dan efesien khususnya dalam pelaksanaan Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif analisis dengan jenis pendekatannya adalah kualitatif. Metode yang bersifat menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan.Sedangkan pendekatan kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya tercapai secara efektif. Artinya Pemerintah Kabupaten Bandng dalam hal melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan secara organisatoris belum banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin.Namun, program ini telah berperan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sedangkan tingkat responsivitas masyarakat. atas program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung ini telah memuaskan harapan, persepsi, atau nilai masyaraka. Walaupun masih tetap ada permasalahan/kendala yang muncul di masyarakati.

Fungsi Strategi Pengembangan Organisasi Dalam Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Di Kabupaten Bandung melalui faktor 1) *Plan* (*structured to unstructured*), 2) *Power* (*unilateral to delegated*), 3) *Relationship* (*impersonal to personal*) dan

4) *Tempo* (*revolutionary to evolutionar)*, belum berjalan sepenuhnya secara efektif. Berdasarkan hasil Analissis SWOT, beberapa hal yang harus dapat dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Di Kabupaten Bandung sehingga hasilnya efektif, yaitu:

1. Adanya regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) baik dari tingkat Kementrian PUPR, maupun dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi dan Kabupaten.
2. Pengembangan/struktur organisasi dalam pelaksanaan Program Rutilahu dimana BKM ditetapkan oleh anggota, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana swakelola
3. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Di Kabupaten Bandung sejalan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. Partisipasi yang diberikan masyarakat tidak hanya berupa uang, barang, tenaga, dan yang lebih terlihat nyata mereka yang melakukan pekerjaan juga membawa bahan makan ataupun makanan dari rumah sehingga waktu istirahat, mereka makan bersama-sama.
5. Memaksimalkan peran lembaga swadaya masyarakat atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam menampung aspirasi dari berbagai pihak.
6. Terdapat P*latform* kolaborasi, yang bernama lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga dengan adanya kerjasama ini dapat membangun komitmen antara lembaga swasta dengan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menangani permukiman kumuh.
7. Memaksimalkan kinerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
8. Meningkatkan kinerja SDM dalam penanganan permukiman kumuh serta dalam pengembangan teknologi informasi dalam menyebarluaskan informasi

Kata Kunci :Fungsi Strategi Pengembangan Organisasi

***ABSTRACT***

The main problem in this research is that the Department of Public Housing, Settlement and Land Areas (Disperkimtan) Bandung Regency, has not been able to provide effective and efficient work results, especially in the implementation of the Uninhabitable Home Improvement Program (Rutilahu).

The research method used in this study is descriptive analysis with a qualitative approach. A method that describes a situation that is ongoing at the time the research is carried out. While the qualitative approach is intended as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior.

Based on the results of the research that the implementation of organizational development in the implementation of the Uninhabitable House Program at the Public Housing, Settlement and Land Areas in Bandung Regency has not been fully achieved effectively. This means that the Government of Bandng Regency in terms of through the Office of Public Housing, Settlement Areas and Land has not helped the community much to improve the quality of life/health status of the poor. However, this program has played a role in reducing the number of uninhabitable houses. While the level of community responsiveness. The improvement program for uninhabitable houses (Rutilahu) in Bandung Regency has satisfied the expectations, perceptions, or values of the community. Although there are still problems / obstacles that arise in society.

Organizational Development function Strategy in Implementing Uninhabitable Houses Program at the Public Housing, Settlement and Land Areas in Bandung Regency through factors 1) Plan (structured to unstructured), 2) Power (unilateral to delegated), 3) Relationship (impersonal to personal) and 4) Tempo (revolutionary to evolutionary), has not been fully effective. Based on the results of the SWOT analysis, several things must be done by the Department of Public Housing, Settlement and Land Areas in Bandung Regency so that the results are effective, namely:

1. *There are clear regulations regarding the implementation of the Uninhabitable Houses Program (Rutilahu) both from the PUPR Ministry level, as well as from the Provincial and Regency Public Housing, Settlement and Land Areas.*
2. *Development/organizational structure in the implementation of the Rutilahu Program where BKM is determined by members, responsible for the realization of physical, financial, and administrative activities/works carried out according to the self-management plan*
3. *The vision and mission of the Department of Public Housing, Settlement and Land in Bandung Regency is in line with the West Java Provincial Government*
4. *The participation given by the community is not only in the form of money, goods, energy, and what is more visible is those who do the work also bring food or food from home so that during rest, they eat together.*
5. *Maximizing the role of non-governmental organizations or the Community Self-Help Agency (BKM) in accommodating the aspirations of various parties.*
6. *There is a collaboration platform, called a non-governmental organization (NGO) or Community Self- Sufficiency Agency (BKM) with the Bandung Regency Government, so that this collaboration can build commitment between private institutions and the Bandung Regency Government to deal with slum settlements.*
7. *Maximizing the performance of the Housing and Settlement Area Working Group (Pokja PKP)*
8. *Improving the performance of human resources in handling slums and in developing information technology in disseminating information*

Keywords: Organizational Development function Strategy

# DAFTAR PUSTAKA

African Capacity Building Foundation (ACBF). 2001. *Capacity Needs Assesment*

*: A Conceptual Framework*, in ACBF Newsletter Vol. 2, p. 9-12.

Brown, L. Anne LaFond, & Macintyre, K. 2001. *Measuring Capacity Building*. Carolina Population Centre. University of Northe Carolina. Chapel Hill. Bryant C, L.G., White. 1986. *Management* *Pembangunan* *Untuk*

*Negara*

Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* Third Edition. California : Sage Publication, Inc. Creswell, W. John. 1994. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. California : Sage Publications, Inc.

Daft, Richard L. 1992. *Organizational Behavior*. San Fransisco : W.H Freeman and Company

Djatmiko,Yayat Hayati. 2015. Perilaku Organisasi. Bandung : CV.Alfabet

Eade, D. 1997. *Capacity Building : An Approach to People – Centered Development*. Okfam (UK and Ireland).

George M. Jennifer and Jones R. Gareth. 2005. *Understanding and Managing Organizational Behavior, Fourth Edition*. New Jersey : Pearson Prentice Hall of Pearson Education Inc.

Grindle, M.S. 1997. *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing the Dimension of Countries,* Boston. MA : Harvard Institute for International Development*.*

Hatch, M . J. 1997. *Organzation Theory: Modern, Symbolic, and Post- Modern Perspective*, Oxford: Oxford Univ. Press [*http://bappenas.go.id/get-file-*](http://bappenas.go.id/get-file-) *server/node/8559/.*

JICA, 2004. *Perspective for Perceiving Capacity*. Chapter 2.

Kluckhohn, C. 1953. *Universal Categories of Culture. Antropology Today, A.L*. Chichago : University Press

Koentjaraningrat, 1986. *“*Pengantar Ilmu Antropologi*”*, Jakarta: PT Rineka Cipta. Lusthaus, Charles, et., all. 2002. *Organizational Assessment. A Framework for improving performance.* Ottawa : Inter-American Development Bank,

McKinsey (2011) melakukan penelitian dengan judul “*Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations.*”

R. Dye, Thomas. (1987). *Understanding Public Policy*. United States of America. Prentice-Hall.

Robbins, S. 1990. *Organization Theory: Structure, Design, and Applications.*

Englewood Cliffs NY: Prentice- Hall

Sastra M, Suparno.dkk. 2006. Perencanaan dan Pengembangan Perumahan.

Yogyakarta: CV. Andi.

Shafritz, J.M., & E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York: Addison-Wesley Educational Publisher.

Suryadi Soleh , Kurniadi . 2021. Collaborative Governance ,Teori dan Implementasinya . Jawa Tengah : CV. Pena Persada

Suryadi Soleh . 2019 . Administrasi Publik dan Otonomi Daerah. Bandung : Prisma Press.

United Nation Development Programme. 2004. *Reducing Disaster Risk : A Challenge for Development.* New York : UNDP.

Washington DC and International Development Research Centre. McKinsey & Company. 2001. *Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations.* New York : Venture Philanthropy Partners.

# Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 08/PERMEN/M/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank

.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bandung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Bandung .

Rencana Strategis BAPPEDA Kab. Bandung.